



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dijadikan pedoman dalam:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024; dan
  - b. penyusunan RKA Perangkat Daerah 2024.
- (2) Rencana kerja sekretariat daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana kerja inspektorat daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana kerja badan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana kerja badan penanggulangan bencana Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana kerja badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana kerja badan riset dan inovasi Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Rencana kerja dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana kerja dinas kesehatan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana kerja dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana kerja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana kerja dinas kearsipan dan perpustakaan Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana kerja dinas kebudayaan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana kerja dinas ketahanan pangan dan perikanan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana kerja dinas komunikasi dan informatika Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana kerja dinas perhubungan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana kerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana kerja dinas lingkungan hidup dan pertanahan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana kerja dinas pariwisata Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana kerja dinas ketenagakerjaan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana kerja dinas pertanian Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (28) Rencana kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana kerja kecamatan nusa penida Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana kerja kecamatan dawan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana kerja kecamatan banjarangkan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana kerja kecamatan klungkung Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

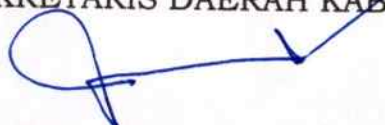
Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 16 Agustus 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



DEWA GDE DARMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 28



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DINAS KETENAGAKERJAAN



RENCANA KERJA  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya Ranwal Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dapat tersusun.

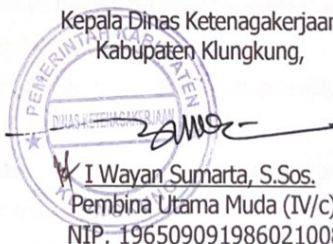
Kedudukan Ranwal Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan Pedoman penyusunan Anggaran di Tahun 2024.

Selesaiannya penyusunan Ranwal Rencana Perangkat daerah ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

1. Tim Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
2. Bidang Koordinasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung.
3. Staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
4. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Ranwal Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Sumarta, S.Sos.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196509091986021008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja PD merupakan salah satu dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah yang memuat program kegiatan yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan dibuat setiap tahun. Penyusunan Renja dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja PD sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi enam tahapan yaitu a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan, d) pelaksanaan forum perangkat daerah, e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

Renja PD disusun berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi . Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun,



berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

maka penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya.. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimisasi pencapaian sasaran Renstra PD. Penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan hasil evaluasi yang memuat identifikasi permasalahan, isu strategis dan rekomendasi tindak lanjut untuk memecahkan masalah.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan Renstra PD ke dalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, dan program kegiatan prioritas Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan renja PD memerlukan masukan dari stakeholders melalui forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal Renja PD secara partisipatif dari stakeholders meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyesuaian program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah ditetapkannya RKPD dengan Peraturan Bupati. Penetapan ini menjadikan Renja PD memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan pedoman bagi penyusunan dokumen penganggaran.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023
- 6) Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor : Nomor : 000.7.2.4/99/Baperlitbang tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah untuk :

- a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Disnaker Tahun Anggaran 2024.
- b. menyediakan tolak ukur penilaian kinerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target kerjanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnaker Kabupaten Klungkung selama tahun 2024 dan sejalan dengan target dan prioritas daerah.
- b. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Disnaker Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :
  - a. Latar belakang (berisi tentang pengertian renja, proses penyusunan, keterkaitan dengan dokumen RKPD, renstra),
  - b. Landasan hukum (menyajikan peraturan yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD)
  - c. Maksud dan tujuan,
  - d. Struktur Organisasi, dan
  - e. Sistematika Penulisan
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU terdiri dari :
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra (realisasi program/keg, factor penghambat, implikasinya terhadap target akhir renstra, kebijakan/tindakan yg perlu diambil.
  - b. Analisis kinerja Pelayanan perangkat Daerah (menyajikan SPM, NSPK atau IKU).
  - c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
  - d. Review terhadap Ranwal RKPD

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD terdiri dari :
  - a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - b. Tujuan dan sasaran renja
  - c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (menjelaskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas PD dan targetnya yg terkait prioritas daerah, factor yg menjadi bahan pertimbangan, dan rumusan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan ranwal)
  - d. Rencana Kerja dan Pendanaan PD
  - e. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (jumlah, lokasi/sasaran, indikaotr dan target) dan pagu indikator yang dibutuhkan.
4. BAB IV PENUTUP yang berisikan tentang catatan penting yg perlu mendapat perhatian baik dlm rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran dan kaidah-kaidah pelaksanaan.
5. Lampiran-lampiran

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKER TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD SKPD yang bersangkutan. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2022 sesuai bidang urusan pemerintahan daerah yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang industry dan transmigrasi didukung 5 program, 12 Kegiatan dan 16 Sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Sirenbangda terlampir.

Konsistensi penyusunan Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan pelaksanaannya (DPA OPD) Tahun 2022 terbangun cukup baik yang terlihat dari kesesuaian program dan kegiatan yang dirancang dari Renstra, Renja dan DPA OPD. Berdasarkan hasil evaluasi renja triwulan IV tahun 2022, total rata rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 100% dengan predikat kinerja Baik (B) sedangkan tingkat serapan anggaran sebesar 95,54 % dengan predikat kinerja Baik (tabel sirenbangda terlampir). Adapun capaian target kinerja program/ kegiatan dan penyerapan dana renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 diuraikan sesuai bidang urusan, adalah sebagai berikut :

##### **1. Bidang Urusan Ketenagakerjaan**

Dengan didukung 4 program, total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu sebesar 95,55% dengan predikat Baik (B). Program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotak, dengan total rata rata capaian anggaran dan Kinerja dari seluruh kegiatan yaitu 96,89% dan 150,86% berpredikat kinerja Sangat Baik (SB).

- 2) Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan total rata rata capaian anggaran dan Kinerja dari seluruh kegiatan yaitu 91,69% dan 100% berpredikat kinerja Baik (B).
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, total rata rata capaian anggaran dan kinerja dari seluruh kegiatan adalah sebesar 94,30% dan 125,00% dengan predikat kinerja Sangat Baik.
- 4) Program Hubungan Industrial, total rata rata capaian anggaran dan kinerja dari seluruh kegiatan adalah sebesar 78,25% dan 100,65% dengan predikat kinerja Sedang ( S ).

## **2. Bidang Ketransmigrasian**

Bidang Urusan Ketransmigrasian pada Renja Disnaker Tahun 2022 didukung (1) program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketransmigrasian adalah sebesar 92,53% dan dengan capaian kinerja sebesar 180.00 dengan predikat anggaran dan kegiatan Sangat Baik (SB).

## **3. Bidang Urusan Sumber Daya Energi dan Mineral**

Badan Urusan Sumber daya Energi dan Mineral dengan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak ada dikarenakan belum ditemukannya panas bumi di Kabupaten Klungkung.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Ketenagakerjaan ingin mewujudkan:.

Wirausaha mandiri serta Tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif baik berbasis kompetensi kerja maupun keterampilan berbasis masyarakat serta memperoleh perlindungan secara maksimal bagi kesejahteraannya secara lahir dan bathin, sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan serapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan khususnya di Kabupaten Klungkung.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas maka ditetapkan tujuan jangka menengah Disnaker Kabupaten Klungkung yaitu (1) meningkatnya daya saing masyarakat dengan Sasaran Paritas daya Beli. Upaya pencapaian tujuan tersebut dijabarkan melalui sasaran OPD yakni (1) Terserapnya angkatan kerja dengan

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (2) Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan dengan Indikator Persentase Tingkat Produktivitas Pekerja dari 2 Sasaran tersebut Dijabarkan dengan 6 Program program perangkat Daerah dengan indikator yang teukur seperti : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotak, 2. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 3. Program Penempatan Tenaga Kerja, 4. Program Hubungan Industrial, dan yang ke 6. program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tujuan dan sasara jangka menengah pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					
				Kondisi awal	2024	2025	2026		Kondisi akhir
1	Meningkatnya daya saing masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka Oleh BPS	1,85 %	1,85 %	1,7 %	1,65 %		1,65 %
		Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42,51 %	42,5 1 %	42,5 1 %	42,5 1 %		42,51 %
		Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial	2 Perse lisiha n	2 Pers elisi han	1 Pers elisi han	1 Pers elisi han		1 Perseli sihan

Sumber: Rensra Disnaker Kab. Klungkung 2024-2026

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi social. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan Pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari hari, sedangkan dimensi social berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan (1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga

kerja secara optimal dan manusiawi; (2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (3) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dengan memberdayakan tenaga kerja, membuka peluang serapan tenaga kerja sehingga dapat mencapai tujuan dalam upaya menurunkan pengangguran yang berarti pula mengurangi kemiskinan. Melalui program/kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung berupaya memberdayakan tenaga kerja di daerah baik yang menganggur, setengah menganggur maupun yang bekerja. Seperti memberikan pelatihan/pembekalan bagi pencari kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta sertifikasi kompetensi bagi yang sudah terlatih agar lebih mampu bersaing di era globalisasi, padat karya dan pembentukan wirausaha muda yang mandiri, pengembangan TKI pendamping melalui *'transfer knowledge'* dan pengendalian TKA. Memfasilitasi pemberi kerja dengan pencari kerja melalui bursa tenaga kerja, memfasilitasi hubungan industrial guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya cukup banyak. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah/ daerah. Karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut. TPAK yang tinggi juga menunjukkan besarnya



kesempatan kerja yang tersedia, besarnya kesempatan kerja tentunya dapat menurunkan pengangguran.

Tabel 2.3  
BPS Kabupaten Klungkung

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	106.993	106.852	104.268	115.235
Bekerja	105.314	101.058	98.691	112.973
Pengangguran	1.679	5.794	5.577	2.262
Bukan angkatan kerja	33.694	35.098	38.904	29.154
Jumlah Penduduk Usia kerja	140.687	141.450	143.172	144.389
TKK	98.43	94.58	94.65	98.04
TPAK	76,05	75.27	72.83	79.81
TPT	1.57	5.42	5.35	1.96

*Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2022*

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

### Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Sistem informasi Tenaga Kerja belum terbangun sebagai landasan kebijakan Tenaga Kerja;
- 2) Informasi pasar tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah masih kurang update;
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi bursa kerja;
- 4) Masih lemahnya link and match antara lembaga pendidikan dengan kualifikasi kebutuhan dunia kerja;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi Tenaga Kerja;
- 6) Rendahnya minat kewirausahaan guna penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja mandiri;
- 7) Rendahnya kesadaran dan pemahaman tenaga kerja tentang pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan;
- 8) Masih terbatasnya jaringan kerja dengan Lembaga Diklat dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;

- 9) Rendahnya minat kewirausahaan di kalangan generasi muda;
- 10) Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif perusahaan menerapkan norma K3;
- 11) Rendahnya kesadaran perusahaan mematuhi perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja;
- 12) Lemahnya kapasitas pengawasan penjaminan sosial tenaga kerja;
- 13) Sistem imbalan yang relatif kompleks dengan banyak variabel tunjangan yang masing-masing mempunyai potensi menjadi sumber perselisihan;
- 14) Banyaknya pekerja berdasarkan kontrak kerja atau tenaga kerja *outsourcing* yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja;
- 15) Tidak seimbangnya pertumbuhan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia;
- 16) Masih lemahnya pemetaan kebutuhan calon tenaga kerja/tenaga kerja terhadap diklat dan pemagangan

#### Bidang Transmigrasi

- 1) Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
- 2) Lemahnya sosialisasi terkait ketransmigrasian, baik transmigrasi daerah pengiriman maupun daerah penerima;
- 3) Belum adanya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah penerima terhadap kehadiran transmigran;
- 4) Animo masyarakat bertransmigrasi bersifat musiman.

#### 1. Isu strategis urusan ketenagakerjaan meliputi:

- Peningkatan produktivitas tenaga kerja usia muda
- Peningkatan profesionalisme tenaga kerja pariwisata

#### 2. Isu strategis urusan transmigrasi meliputi:

Peningkatan minat bertransmigrasi melalui pengembangan potensi ekonomi daerah tujuan transmigrasi. Adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang disebabkan oleh keterbatasan lahan perkebunan.

## 2.7 Reviu terhadap Ranwal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS yang ditetapkan. Reviu terhadap rumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran Renja Disnaker Tahun 2022 sudah sesuai dengan Ranwal RKPD, walaupun adanya perubahan indikator kinerja dan pagu anggaran di beberapa program/ kegiatan, berdasarkan analisa kebutuhan. Reviu terhadap rancangan awal RKPD Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2022 disajikan dalam tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/ 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2022		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																	
1.2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi (Poin)	23 Poin	338,811,205.00	0%	0,00	22,00 Poin	4,067,514,895.00	22,00 Poin	3,838,600,030.00	22,00 Poin	3,838,600,030.00	31,00 Poin	3,601,299,332.00	31,00 Poin	7,439,899,362.00	31,00 Poin	2312472485400%
1.2.07.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Indek Reformasi Birokrasi (Poin)	100%	23,214,650.00	0%	0,00	100,00 %	10,324,650.00	100,00 %	10,099,200.00	100,00 %	10,099,200.00	100%	8.361.200,00	100%	18,460,400.00	100%	7219810200%
1.2.07.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat	15 Dokumen %	13,765,450.00	0%	0,00	15,00 Dokumen	6,980,850.00	15,00 Dokumen	6,809,500.00	15,00 Dokumen	6,809,500.00	15,00 Dokumen	4.718.400,00	15,00 Dokumen	11,527,900.00	15,00 Dokumen	4589320000%
2.2.07.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	32 laporan %	852,600.00	0%	0,00	32 Laporan	3,343,800.00	32 Laporan	3,289,700.00	32 Laporan	3,289,700.00	32 Laporan	3.642.800,00	32 Laporan	6,932,500.00	32 Laporan	1770830000%

7 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (Poin)	100%	7,483,570,768.00	0'0%	0.00	100,00 %	3,640,832,364.00	100,00 %	3,428,719,168.00	100,00 %	3,428,719,168.00	100,00 %	3,263.644.391,00	100,00 %	6,692,363,559.00	100,00 %	2467420502700%
7 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN (%)	26 Orang	7,386,972,136.00	0'0%	0.00	26 Orang	3,589,714,822.00	26 Orang	3,380.167.076,00	24 Orang	3,380,167,076.00	24 Orang	3,218.163.301,00	24 Orang	6,598,330,377.00	24 Orang	2095518441100%
7 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	Tersusunnya Laporan keuangan bulanan dan	14 Laporan	96,598,632.00	0'0%	0.00	14 Laporan	51.117.542,00	14 Laporan	48.552.092,00	14 Laporan	48,552,092.00	14 Laporan	45.481.090,00	14 Laporan	94,033,182.00	14 Laporan	23918390600%
7 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (Poin)	100%	21,855,636.00	0'0%	0.00	100,00 %	96.654.368,00	100,00 %	87.567.268,00	100,00 %	87,567,268.00	100,00 %	95.655.198,00	100,00 %	183,222,466.00	100,00 %	29264537000%
7 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat	12 Dokumen	21,855,636.00	0'0%	0.00	12 Dokumen	96.654.368,00	12 Dokumen	87.567.268,00	12 Dokumen	87,567,268.00	12 Dokumen	95.655.198,00	12 Dokumen	183,222,466.00	12 Dokumen	29264537000%
7 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	100%	613,170,151.00	0'0%	0.00	100,00 %	319.703.513,00	100,00 %	312.214.394,00	100,00 %	312,214,394.00	100,00 %	233.638.543,00	100,00 %	545,852,937.00	100,00 %	147123748200%
7 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	84.00	609,100,051.00	0'0%	0.00	84.00	318.252.963,00	#####	310.819.794,00	84.00	310,819,794.00	#####	233.638.543,00	84.00	544,458,337.00	84.00	146437860200%
7 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Jasa Surat Menyurat (Persen)	4 Dokumen	4,070,100.00	0'0%	0.00	4 Dokumen	1.450.550,00	4 Dokumen	1.394.600,00	4 Dokumen	1,394,600.00	4 Dokumen	2.619.550,00	4 Dokumen	4,014,150.00	4 Dokumen	947885000%

2.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pekerja Yang Tersertifikasi sesuai Job Desc	10,36 %	2,642,127,472.03	9,75 Persen	1,139,478,022.03	10 %	514.845.800,00	10 %	472.056.790,00	10 %	472,056,790.00	10,36 %	679.004.650,00	10,36 %	2,902,290,539,462.03	10,36 %	290654420174609%
5.2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelatihan Yang Dilaksanakan Sesuai	12 %	978,509,859.03	9,75 Persen	537,001,409.03	10 %	59.692.550,00	10 %	44.292.750,00	10 %	44,292,750.00	12%	97.890.900,00	12%	679,185,059.03	12%	223898907709%
8.2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	20 Orang	978,509,859.03	9,75 Persen	537,001,409.03	20 Orang	59.692.550,00	20 Orang	44.292.750,00	20 Orang	55,262,800.00	40 Orang	97.890.900,00	40 Orang	679,185,059.03	40 Orang	224995912709%
6.2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Persentase	40%	1,663,617,613.00	9,75 Persen	602,476,613.00	10 %	455.153.250,00	10 %	427.764.040,00	10 %	427,764,040.00	40 %	581.113.750,00	40 %	1,030,821,766.75	40 %	372468003275%
9.2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya	50 Orang	1,663,617,613.00	9,75 Persen	602,476,613.00	50 Orang	455.153.250,00	50 Orang	427.764.040,00	50 Orang	452,414,040.00	35 Orang	581.113.750,00	35 Orang	1,611,354,403.00	35 Orang	432986266900%
3.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terserapnya Tenaga kerja (Persen)	60,90 %	4.596.544,669.00	59,7 %	3.266,565,019.00	60 %	260.702.050,00	60 %	1.576.240.875,00	60 %	1,054,836,775.00	60,90 %	930.864.159,00	60,90 %	5,773,670,053.00	60,90 %	1469161651600%
7.2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Terserap Melalui Pola Padat	44 Orang	4,322,169,969.00	265 Orang	302,765,219.00	30 Orang	214.889.350,00	30 Orang	1.533.525.425,00	30 Orang	1,103,746,725.00	44 Orang	886.107.059,00	44 Orang	2,722,397,703.00	44 Orang	845107961600%
10.2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan	44 Orang	4,322,169,969.00	265 Orang	302,765,219.00	30 Orang	214.889.350,00	30 Orang	1.533.525.425,00	30 Orang	1,103,746,725.00	44 Orang	886.107.059,00	44 Orang	2,722,397,703.00	44 Orang	845107961600%
8.2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Perusahaan	61 %	149,794,450.00	60 %	119,469,200.00	60 %	33.040.500,00	60 %	30.755.000,00	60 %	30,755,000.00	61 %	30.411.250,00	61 %	180,635,450.00	61 %	48065410000%
11.2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam	200 Orang	149794450	60 %	119,469,200.00	200 Orang	33.040.500,00	200 Orang	30.755.000,00	200 Orang	30,755,000.00	200 Orang	30.411.250,00	200 Orang	180,635,450.00	200 Orang	48065410000%
9.2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah	Persentase TKA dan TKI pendamping (persen)	90 %	91,539,750.00	59,7 %	64,330,600.00	60 %	12.772.200,00	60 %	11.960.450,00	60 %	11,960,450.00	60 %	14.345.850,00	60 %	90,636,900.00	60 %	25846770000%
12.2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	Persentase TKA dengan TKI Pendamping (persen)	90%	91,539,750.00	59,7 %	64,330,600.00	60 %	12.772.200,00	60 %	11.960.450,00	60 %	11,960,450.00	60 %	14.345.850,00	60 %	90,636,900.00	60 %	25846770000%

4.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma dan	97,60 %	321,822,710.00	95,4 %	153,655,410.00	97 %	72.732.000,00	97 %	56.910.000,00	97 %	56,910,000.00	97,60 %	243.568.850,00	97,60 %	454.134.260.00	97,60 %	98652238000%
10.2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Memili Peraturan Perusahaan dan Persentase Keperserta	5 %	160,724,500.00	95,4 %	75,940,000.00	10 %	40.047.800,00	10 %	34.941.000,00	10 %	34,941,000.00	5 %	213.022.000,00	5 %	323,903,000.00	5 %	59550850000%
13.2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan	12 Laporan	160,724,500.00	95,4 %	75,940,000.00	12 Laporan	40.047.800,00	12 Laporan	34.941.000,00	12 Laporan	34,941,000.00	12 Laporan	213.022.000,00	12 Laporan	323,903,000.00	12 Laporan	59550850000%
11.2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit dan persentase perselisihan hubungan	100 %	5,471,800.00	95,4 %	77,715,410.00	100 %	32.684.200,00	100 %	21.969.000,00	100 %	21,969,000.00	100 %	30.546.850,00	100 %	130,231,260.00	100 %	23538747000%
14.2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2 Perselisihan	2,160,000.00	95,4 %	49,575,550.00	100%	10.611.400,00	2 Perselisihan	7.205.000,00	2 Perselisihan	7,205,000.00	2 Perselisihan	14.369.150,00	2 Perselisihan	21,574,150.00	2 Perselisihan	8051470100%
15.2.07.05.2.02.03	an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Serikat Pekerja)	1 Serikat Pekerja	3.311.800.00	95,4 %	28.139.860,00	1 Serikat Pekerja	22.072.800,00	1 Serikat Pekerja	14.764.000,00	1 Serikat Pekerja	14,764,000.00	1 Serikat Pekerja	16.177.700,00	1 Serikat Pekerja	30,941,700.00	1 Serikat Pekerja	4570570000%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																		
3.32																		
5.3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kuota transmigrasi yang terpenuhi	42,51 %	171,191,900.00	42,51 %	8,174,900.00	20 KK	10.746.500,00	20 KK	9.944.100,00	20 KK	9,944,100.00	20 &	18.731.600,00	20%	1.410.000,00	20%	18931090020%
12.3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1	Persentase Jumlah Animo Transmigrasi	20 KK	171,191,900.00	20 KK	8,174,900.00	20 %	10.746.500,00	20 %	9.944.100,00	20 %	9,944,100.00	20%	18.731.600,00	20%	1.410.000,00	20%	18931090040%
16.3.32.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	20 %	171,191,900.00	20 %	8,174,900.00	20 %	10.746.500,00	20 %	9.944.100,00	20 %	9,944,100.00	20%	18.731.600,00	20%	1.410.000,00	20%	18931090040%

Tabel 2.8  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71 Indeks	4.298.559.365	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71 Indeks	3.850.965.551	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase hasil Evaluasi kinerja PD yang ditindak lanjuti (Persen)	100 %	34.196.943	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase hasil Evaluasi kinerja PD yang ditindak lanjuti (Persen)	100 %	16.077.780	Tersedianya dokumen Renja, DPA, RKA dan Evaluasi Renja (induk dan perubahan) ( CIK, Pemantauan Rencana Aksi, LKPJ, Evaluasi Renja, LKJiP dan LPPD)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	4.718.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3,095,080	



	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	29.478.543	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	12,982,700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat (Laporan)	100 %	3.685.151.467	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat (Laporan)	100 %	3.256.190.048	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan tersedianya laporan keuangan fungsioal
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	3.628.922.171	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	3,202,793,224	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	56.229.296	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	53,396,824	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	100 %	95.799.048	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	100 %	94.695.836	tersusunnya adminstrasi kepegawaian dan pembayaran jasa tenaga kontrak

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	95.799.048	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	94,695,836	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (Persen)	100 %	33.762.150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (Persen)	100 %	43.255.840	Belanja rutin (listrik, telkom air, pemeliharaan sarpras dll), jasa tenaga kontrak
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneangan Bangunan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.046.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneangan Bangunan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,046,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.503.360	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39,368,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	936,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.712.790	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1,905,840	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	166.439.753	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	157.539.544	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	42.274.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	45,909,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 paket	124.165.753	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 paket	111,630,544	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	283.210.004	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	283.206.503	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	73.740.004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	73,736,503	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	10.070.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	10,470,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	199.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	199,000,000	
2.2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	60 Orang	746.905.115	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	60 Orang	1.696.243.020	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	20 Orang	107.679.999	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	20 Orang	107.517.800	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	20 Orang	107.679.999	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	20 Orang	107,517,800	

	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	40 Orang	639.225.125	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	40 Orang	621,065,020	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Orang	639.225.125	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Orang	621,065,020	
2.3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Antar Kerja	60,90 %	1.58.362.199	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Antar Kerja	60,90 %	1.012.182.580	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan	4317 Orang	1.802.599.999	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan	4317 Orang	968.059.740	
	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	265 Orang	654.735.819	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	265 Orang	130,195,560	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja	172 Orang	1.147.864.180	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja	172 Orang	837,864,180	

	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	200 Orang	35.325.250	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	200 Orang	28.106.080	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	35.325.250	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	28,106,080	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA	13 Orang	20.436.950	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA	13 Orang	16.016.760	
	Kordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA	13 Orang	20.436.950	Kordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA	13 Orang	16,016,760	
2.4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial	5 %	111.203.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial	5 %	82.424.280	

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial	5 %	65.541.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial	5 %	46.725.000	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	65.541.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	46,725,000	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perselisihan Termediasi	100 %	45.662.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perselisihan Termediasi	100 %	35.699.280	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2 Paket	20.002.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2 Paket	10,039,460	

	Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Serikat Pekerja	25.660.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Serikat Pekerja	25,659,820	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
3.1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kuota transmigran yang terpenuhi	20 %	79.475.600	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kuota transmigran yang terpenuhi	20 %	57,372,960	
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah animo transmigran	20 %	79.475.600	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah animo transmigran	20 %	57,372,960	



	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah animo transmigran	20 %	79.475.600	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah animo transmigran	20 %	57,372,960	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM										

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

##### 1. Bidang Ketenagakerjaan

Delapan arah kebijakan Renstra Kemnaker pada 2022-2024. Rinciannya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills.
- 3) Mengembangkan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.
- 4) Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi "demand" tenaga kerja.
- 5) Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).
- 6) Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.
- 8) Meningkatkan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik Peningkatan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) secara online.

## 2. Bidang Transmigrasi

### Kebijakan Transmigrasi:

- 1) Menempatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai program prioritas nasional/daerah;
- 2) Mendorong peningkatan kemandirian ekonomi di kawasan transmigrasi sesuai prinsip ekonomi hijau;
- 3) Mengembangkan mekanisme (model) introduksi kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi;
- 4) Meningkatkan kontribusi perekonomian kawasan transmigrasi terhadap kabupaten/provinsi.
- 5) Mempertegas pembagian peran pemerintah/pemda dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan transmigrasi;
- 6) Meningkatkan konektivitas internal kawasan transmigrasi;
- 7) Meningkatkan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan pusat-pusat pelayanan di sekitarnya;
- 8) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur serta aksesibilitas di kawasan transmigrasi.
- 9) Memantapkan basis data calon transmigran minimal hingga tingkat kabupaten;
- 10) Memantapkan kriteria, target, dan proses seleksi calon transmigran;
- 11) Meningkatkan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi;
- 12) Mendorong proses integrasi sosial budaya baik antar sesama transmigran maupun antara transmigran dengan penduduk setempat.
- 13) Meningkatkan sinergi pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
- 14) Membangun kerjasama antara daerah (terutama antar provinsi) yang efisien dan efektif dalam mengembangkan kawasan transmigrasi;
- 15) Mengembangkan program insentif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembinaan berkelanjutan untuk membangun kawasan transmigrasi;
- 16) Meningkatkan efektifitas delivery program untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan merujuk pada skema desentralisasi.

- 17) Mengembangkan model promosi yang efektif dan efisien untuk kawasan transmigrasi prioritas dan kawasan transmigrasi baru;
- 18) Memantapkan mekanisme penyediaan lahan untuk kawasan transmigrasi terutama pada wilayah dengan sistem tenurial yang khas.

Rensra PD Provinsi Bali disusun berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024- 2026 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi . Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
6. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

maka penyusunan Rensra Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 -2026 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya.. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)

Adapun Maksud Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk: - Menjabarkan tujuan dan sasaran ke dalam rencana program/kegiatan periode 3 (tiga) tahun yang bersifat indikatif; - Menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ESDM.

- Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, serta aspirasi masyarakat dan Tujuan: Tujuan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:
  - Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sekaligus acuan penentuan pilihan program/kegiatan tahunan; - Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - Menjamin keberlangsungan program/kegiatan ketenagakerjaan, ESDM, dan transmigrasi berjalan secara terencana, terpola dan berkelanjutan
- Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 akan memudahkan perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih baik, dan mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Tujuan Pemerintah Daerah Tujuan Perangkat Daerah

1. Menurunkan tingkat Kemiskinan Krama Bali; Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan
2. yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah  
Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
- 3 . Persentase EBT 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim;

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut: Sasaran Pemerintah Daerah Sasaran Perangkat Daerah

1. Menurunnya pengangguran
2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
3. Meningkatnya penggunaan energi bersih

Sasaran perangkat daerah yakni

1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Daya
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah mengupayakan melalui beberapa sasaran beserta indikatornya sebagai alat ukur/untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan.

Indikator-indikator sasaran tersebut ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama/IKU Perangkat Daerah. Ada pun IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2024-2026 sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 NO Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026) Tahun 2021 2024 2025 2026 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja 94,63% 97,43% 97,99% 98,59% 98,59% 2 Persentase tenaga kerja yang berdaya saing 56,71% 86% 89% 92% 92% Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 68 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci/IKK Indikator Kinerja Kunci/IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK. Ada pun IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2024-2026 sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun (2026) 2021 2024 2025 2026 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 0,43% 0,45% 0,48% 0,50% 0,50% 3 Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 42.87% 43.37% 43.87% 44.37% 44.37% 4 Persentase Pemanfaatan EBT 2,27% 8.45% 10.65% 12.06% 12.06% Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 69 3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 48,05% 48,15% 48,35% 48,50% 48,50% 4 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 0,61% 0,65%

0,70% 0,75% 0,75% 5 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Desa Yang Teraliri Listrik 100% 100% 100% 100% 100% Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, serta diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan tiga bidang urusan pemerintahan yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, bidang urusan pilihan Ketenagakerjaan, transmigrasi dan ESDM. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Disnaker harus sejalan dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi, dan telah dijabarkan dalam Renstra PD. Disnaker memiliki tugas dan fungsi yang mendukung.

Berdasarkan hal tersebut serta sesuai tugas dan fungsinya, Disnaker menetapkan satu tujuan dengan dua sasaran seperti pada tabel berikut:



Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka	1,85 %			
				Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42,51 %
				Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial	2 Perselisihan

## 3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2024 Disnaker Kabupaten Klungkung merencanakan 5 (lima) program dan 13 (dua belas) kegiatan dan 23 (enam belas) sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Disnaker Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada:

1. Bantuan Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.
2. Pelatihan bagi Wira Usaha Baru
3. Padat Karya
4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
5. Sertifikasi Tenaga Kerja.
6. Peningkatan pembinaan transmigrasi dan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi;
7. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim tenaga kerja;

Tabel T-C 3.2

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KETENAGAKERJAAN KAB. KLUNGKUNG  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>						<b>5.731.519.791,00</b>							<b>7.236.838.155,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>5.674.146.831,00</b>							<b>7.157.362.555,00</b>	
	<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						<b>5.674.146.831,00</b>							<b>7.157.362.555,00</b>	
1.	<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	<b>Indeks</b>		<b>Indeks</b>	<b>71 Indeks</b>	<b>3.850.957.151,00</b>						<b>71 Indeks</b>	<b>4.162.728.728,00</b>	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti</i>	Persen		Persen	100 Persen	16.077.780,00						9 Dokumen	24.152.521,00	
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	3.095.080,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mew ujudkan birokrasi yang santun, beri ntegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	9 Dokumen	10.191.978,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Laporan		Laporan	32 Laporan	12.982.700,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mew ujudkan birokrasi yang santun, beri ntegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	32 Laporan	13.960.543,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	3.256.190.048,00						26 Orang/bulan	3.720.627.100,00	
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.202.793.224,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	26 Orang/bulan	3.675.367.804,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	53.396.824,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	12 Laporan	45.259.296,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	Persen		Persen	100 Persen	94.695.836,00						12 Dokumen	106.593.048,00	
	2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	94.695.836,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	12 Dokumen	106.593.048,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor</i>	Persen		Persen	100 Persen	43.255.840,00						1 Paket	44.222.060,00	
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Paket		Paket	1 Paket	1.046.000,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mew ujudkan birokrasi yang santun, beri ntegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	1 Paket	993.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Paket		Paket	3 Paket	39.368.000,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mew ujudkan birokrasi yang santun, beri ntegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	3 Paket	38.503.360,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan		Laporan	1 Laporan	111.622.144,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	1 Laporan	136.430.279,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik</i>	Persen		Persen	100 Persen	283.206.503,00						4 Unit	88.429.720,00	
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Unit		Unit	4 Unit	73.736.503,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	4 Unit	67.489.720,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit		Unit	13 Unit	10.470.000,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	13 Unit	20.940.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Unit		Unit	1 Unit	199.000.000,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	1 Unit	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi</i>	Orang		Orang	60 Orang	728.582.820,00						60 Orang	821.595.627,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi</i>	Orang		Orang	20 Orang	107.517.800,00						20 Orang	118.447.989,00	
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	Orang		Orang	20 Orang	107.517.800,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	20 Orang	118.447.989,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja</i>	Orang		Orang	40 Orang	621.065.020,00						40 Dokumen	703.147.638,00	
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	621.065.020,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia Berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	40 Dokumen	703.147.638,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Pelayanan Antar Kerja</i>	Persen		Persen	60,90 Persen	1.012.182.580,00						60,90 Persen	2.048.637.200,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan</i>	Orang		Orang	265 Orang	968.059.740,00						309 Orang	1.982.860.000,00	
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>	Orang		Orang	309 Orang	130.195.560,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	309 Orang	1.087.811.792,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	Orang		Orang	128 Orang	837.864.180,00	- Kab Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	128 Orang	895.048.208,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online</i>	Orang		Orang	200 Orang	28.106.080,00						200 Orang	40.340.250,00	
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	Orang		Orang	200 Orang	28.106.080,00	- Kab Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	200 Orang	40.340.250,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA</i>	Orang		Orang	13 Orang	16.016.760,00						13 0	25.436.950,00	
	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0	0		0	13 0	16.016.760,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	13 0	25.436.950,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja</i>	Persen		Persen	5 Persen	82.424.280,00						5 Persen	124.401.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial</i>	Persen		Persen	5 Persen	46.725.000,00						12 Laporan	75.663.000,00	
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	Laporan		Laporan	12 Laporan	46.725.000,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	12 Laporan	75.663.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perselisihan yang Termediasi</i>	Persen		Persen	100 Persen	35.699.280,00						2 Perkara	48.738.000,00	
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	Perkara		Perkara	2 Perkara	10.039.460,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	2 Perkara	19.038.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	Asosiasi dan Serikat Pekerja		Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25.659.820,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	29.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						57.372.960,00							79.475.600,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						57.372.960,00							79.475.600,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Animo transmigrasi yang terpasilitasi</i>	Persen		Persen	20 Persen	57.372.960,00						20 Persen	79.475.600,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi</i>	Kali		Kali	20 Kali	57.372.960,00						12 Laporan	79.475.600,00	
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Laporan		Laporan	12 Laporan	57.372.960,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per-ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	12 Laporan	79.475.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>J U M L A H</b>								<b>5.731.519.791,00</b>							<b>7.236.838.155,00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan Penting**

Renja Disnaker Kabupaten Klungkung tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dilingkup Disnaker Kabupaten Klungkung. Renja Disnaker disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: evaluasi renja tahun sebelumnya, ketersediaan anggaran, program-program prioritas yang mendukung : **MENGUATKAN PEREKONOMIAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DENGAN KONSEP KEMITRAAN**. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu **Menurunkan Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**.

#### **B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah Pelaksanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnaker Kabupaten Klungkung yang meliputi tiga bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar **ketenagakerjaan**, serta urusan pilihan **Transmigrasi** dan **ESDM**, ditetapkan Tujuan 1 yaitu: meningkatnya daya saing masyarakat dengan indikator Paritas daya beli dengan sasaran sasaran 1. Terserapnya angkatan kerja dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dan 2. Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan dengan indikator Persentase Tingkat Produktivitas Pekerja.

#### **C. Rencana Tindaklanjut**

Rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Klungkung yang akan ditetapkan dengan, melalui 5 program, 13 Kegiatan serta 23 Sub kegiatan. Dengan mengoptimalkan dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Disnaker Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DINAS KETENAGAKERJAAN  
Jalan Raya Besakih Akah Telp.(0366)24626 Fax.(0366)24626  
Email : [inaker@klungkungkab.go.id](mailto:inaker@klungkungkab.go.id)  
SEMARAPURA

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH  
RANCANGAN AWAL RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN  
TAHUN 2024

Pada Hari Rabu Tanggal 8 Maret Tahun 2023 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Klungkung Tahun 2024 diadakan dengan Zoom Meeting yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, I Wayan Sumarta, S.Sos.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:  
Hari / Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023  
Jam : 13.00 Wita s/d Selesai  
Tempat/Media : Ruang Kerja Masing - Masing

Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024

MENYEPAKATI

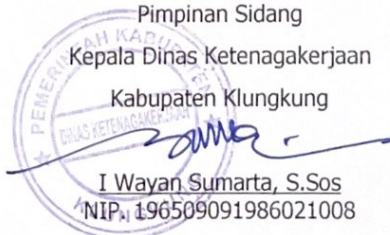
- KESATU : Menyepakati program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan Kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klungkung, 8 Maret 2023.


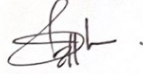

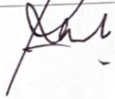
Pimpinan Sidang  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Klungkung

I Wayan Sumarta, S.Sos  
NIP. 196509091986021008



Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Renja Disnaker Tahun 2024

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	TandaTangan
1.	I Nym. Ruspawan	DPMPKSP	Semarapura	
2.	Km. Aldila	Bappeda Klungkung	Semarapura	
3.	I Putu Arnawa	Kec. Klungkung	Semarapura	
4.	Tot de Rom Tay	Dinas pernu	Semara	

Timestamp	Email Address	Nama Lengkap	Instansi	No HP
3/6/2023 7:45:36	ruspawanboy@gmail.com	I Nyoman Ruspawan,ST.,MAP	DPMP/TSP	087861643494
3/7/2023 8:41:02	imademustika0@gmail.com	I Made Mustika,SE.,MH	KSPSI	081353272101
3/8/2023 13:28:24	imadepuripuri@gmail.com	Ni Made Juliasitini, SE, MM	Dinas Ketengakerjaan	081337525909
3/8/2023 13:35:35	imademustika0@gmail.com	I MADE MUSTIKA,SE.,MH	K SPSI	081353272101
3/8/2023 13:37:35	arnrawa99@gmail.com	I Putu Arnawa, SSTP	Kecamatan Klungkung	087861882272
3/8/2023 13:38:41	wayansuja68@gmail.com	Drs. I Wayan Suja	Disnaker	087780776558
3/8/2023 13:39:04	putriantini82@gmail.com	Putri Antini	Dinas Pariwisata	081237467736
3/8/2023 13:43:18	tyokromy@gmail.com	Tjokorda Gde Romy Tanaya S. So	Dinas Pariwisata	08123880072
3/8/2023 13:45:32	iketubudiarata1967@gmail.com	I ketut Budiarta	Dinas Pariwisata	085253429080
3/8/2023 13:46:38	kadekyogakusuma@gmail.com	I Kadek Yoga Kusuma	Kecamatan Dawan	085737286235
3/8/2023 13:59:31	aldilakodil.as@gmail.com	komang aldila saraswati	Baperlibang Kabupaten Klungkur	081337307055
3/8/2023 14:01:19	separsaerink@gmail.com	I Gede Separsa, SS, M A P	Dinas Pertanian Kab. Klungkung	081337090904
3/8/2023 14:44:00	sunprrog.dpmpspkk@gmail.com	I Gede Suyasa Swastika,SE.MM.	DPMP/TSP	081237911511
3/13/2023 9:54:44	hartapanca@gmail.com	I Gede Panca Hartawan, SE	Disnaker	081339716809
3/13/2023 9:56:54	dwiastari.gusti@gmail.com	Gusti Ayu Oka Dwi Astari	Dinas Ketengakerjaan	082144209229
3/13/2023 9:58:59	martiana1965@gmail.com	I wayan sumarta	Disnaker	011246852199
3/13/2023 10:28:23	nimadepuripuri040@gmail.com	Ni made puri	Dinas Ketengakerjaan	196703172000032005
3/13/2023 11:12:25	sonasa.ball@gmail.com	I GEDE PANCA YASA PURA	Dinas Ketengakerjaan	082248514221





PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
Jalan Raya Besakih Akah Telp.(0366)24626 Fax.(0366)24626  
Email : [inaker@klungkungkab.go.id](mailto:inaker@klungkungkab.go.id)  
SEMARAPURA

## NOTULEN

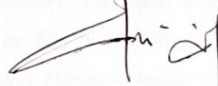
- Sidang/ Rapat : Rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
- Hari/ Tanggal : Sekasa, 8 Maret 2023
- Waktu : 13.00 wita – selesai
- Acara : Rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan Zoom Meeting
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Klungkung
- Peserta Rapat : Yang Hadir Sesuai dengan Daftar hadir Zoom Meeting / Dokumen Zoom Meeting
- Agenda Rapat : Pembahasan Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2022
- Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan Mengaturkan Panganjali Umat  
Om Sastyastu  
Salam Walaikum Waramtulahi Warabaro Katu  
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua  
Salam Gema Santi  
Pemaparan/ Penyajian materi rancangan awal Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Renja Tahun 2024
- Sekretaris Diskop :
  - Salam penghormatan
  - Program Prioritas Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan yakni Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
  - Isu Strategis ada 3 yakni : *Pengangguran Terbuka Cukup Tinggi, Kompetensi Tenaga Kerja rendah, dan Kesempatan Kerja Kurang*
  - *Permasalahan yang ada : Kualitas dan Produktivitas Pekerja, Kesempatan Kerja, dan Terlindunginya Hak-hak Tenaga kerja*
- Kadis Dispernaker :
  - *Pemecahan permasalahan tersebut dengan Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial*

Kadis Dispernaker

- Baik Terimakasih Pak Cok
- Kita akan selalu berkoordinasi terkait dengan pelatihan
- Apalagi Dinas Pariwisata mendapatkan dana Pelatihan dari DAK
- Untuk lebih lanjut kita akan berkoordinasi lebih intens
- Baik ada lagi, .....
- jika tidak ada kami akan tutup Forum Renja Perangkat Daerah Disnaker ini ....
- Om Santih, Santih, Santih Om
- Salam Gema Santi
- .....Rapat / Sidang selesai pukul 02.00 Wita

Searapura, 8 Maret 2023

Pembuat Notulen,



I Gede Panca Hartawan, SE  
NIP. 197907062009021007

*dan Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait dengan Program Transmigrasi.*

- *Adapun jumlah program ada 6 yakni Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi*
- *Sekian pemaparan dari kami, baik jika ada yang memberikan saran atau pendapat kami silahkan ...*
- *Trimakasih*
- *Silahkan dari Baperlitbang ....*

Baperlitbang

- : - *Baik Terimakasih*
- *Salam Penghormatan*
  - *Untuk Kami terkait dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050.099 tahun 2021*

Kadis Dispernaker

- *Target capaian Program dengan perhitungannya agar disampaikan tiap bulan melalui CIK*
- *Setiap tahun Disnaker sudah melaksanakan pelatihan yang berbasis kopetensi dan pelatihan yang lainnya*
- *Kalau ada hibah pemberian alat baru memakai proposal*
- *Untuk pelaksanaan pelatihan bisa dimanfaatkan gedung Plut Diskoperasi*
- *Bisa cros cating dengan Diskop atau dinas yang lainnya*
- *Sekian dari saya*
- *Waktu saya kembalikan*

Pak Kadis Disnaker

- : - *Baik Terimakasih atas sarannya*
- *Proposalnya harus jelas*
  - *Karena disistem kami melakukan verifikasi usulan*
  - *Disana ada 4 usulan yakni 2 usulan dari Pokir dan 2 usulan lagi dari Musrenbangda*
  - *Untuk saran Gedung Plut dipakai untuk pelatihan kami akan koordinasikan nantinya, sesuai gedung tersebut*
  - *Baik Ada yang lainnya lagi*
  - *Silakan Dinas Pariwisata Bapak Cok ...*

Dispar ( Pak Cok )

- : - *Ijin Pak Kadis*
- *Terimakasih atas waktunya*
  - *Salam Penghormatan*
  - *Kami Melati Tenaga kerja pariwisata*
  - *Kemungkinan kami akan cros Cating dengan Disnaker soal pelatihan tersebut*